

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0'' LU$, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0'' BT$, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai ***Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional*** yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang

internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatas dengan kabupaten bengkalis
- Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

4.1.1 Fisiografi

Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan. Pemandangan Alam Selat Air Hitam (Selatpanjang) Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan

litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebingtinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat

beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).

4.1.2 Struktur Tanah

Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

4.1.3 Iklim

Berdasarkan data dari Pemerintahan Provinsi Riau, suhu udara minimum 260 C-320 C dan curah hujan rata-rata antara tahun 1.971-2.000 sebesar 2.191 mm atau 280 hari/ tahun. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Curah hujan dilokasi penelitian berkisar antara 2.095 mm sampai 2.294 mm dengan rata-rata 2.208 mm. dilihat dari distribusi curah hujan bulanannya, maka bulan Mei merupakan bulan yang paling kering, sedangkan

bulan September dan Oktober merupakan bulan yang paling basah. Namun lokasi penelitian merupakan kawasan yang lembab karena curah hujan bulanannya lebih dari 100 mm (Tabel 4.) Hari hujan tahunannya cukup tinggi, yaitu sekitar 118 hari hujan sampai 149 hari hujan sedangkan suhu dan kelembaban udara berkisar antara 26°C sampai 27,40°C dan 82% sampai 88%.

4.1.4 Pengairan

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

4.1.5 Potensi

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi

dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020. Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon* sp) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Sebagai tindak lanjut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Atas dasar itu pula Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk dinas perhubungan dengan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Selama terbentuknya Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Kepulauan Meranti yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Ir. Ramli Mohd. Ali (2009-2011)
2. Drs. H. Nuriman, MM (2011 s/d sekarang)

4.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Visi

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Dan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Tertib, Aman, Nyaman, Lancar Dan Terjangkau Dalam Menunjang Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Diberbagai Sector Dalam Rangka Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Makmur”

Misi

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkualitas, kreatif, proaktif dan professional.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya ekonomi melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, agar setiap program yang telah direncanakan dapat mewujudkan secara nyata dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya organisasi dalam mendukung peranan dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana transportasi angkutan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

4.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pemabantuan. Tugas tersebut meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan udara serta bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan laut dan sungai, dan Perhubungan udara serta bidang Komunikasi dan Informatika
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4.2 Sekretariat

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian, adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas dan kehumasaan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Kepala Bagian Keuangan

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. Penyusunan pelaporan keuangan dan perlengkapan.

3. Sub Bagian Perencanaan Dan Program

Kepala sub bagia perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan

pengendalian, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan program.
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.3 Bidang Perhubungan Laut.

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut

Kepala seksi fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan perhubungan laut, (penyebrangan lintas Kabupaten, DUKS, DLKR, DLKP, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan local dan regional), pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas

perhubungan laut, serta penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan laut.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
- c. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;

Kepala seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan proses izin jaringan trayek laut, izin lintas penyebrangan, izin pembuatan tempat penumpukan kayu, izin jaringan terapung, izin keramba diperairan, pengukuran dan pemeriksaan kelayakan angkutan penumpang dan barang, penetapan kualifikasi urusan jasa angkutan laut, pendataan,

penertiban pas dan sertifikat kapal, pengujian dan penertiban surat keterangan dan kecakapan angkutan laut, proses pemberian izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPPP), surat izin operasi perusahaan no pelayaran dan izin usaha pelayaran rakyat. Serta izin usaha penunjang angkutan laut/ekspedisi muat kapal laut, izin perusahaan bongkar muat, izin jasa pegurusan transportasi, izin perusahaan tally dan izin depo peti kemas, dan pembangunan alur pelayaran bawah dan atas permukaan air.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan
- c. Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan rencana laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut lingkup penerapan peraturan perundang-

undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang, angkutan barang dan pelabuhan.

- b. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut.
- c. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.4 Bidang Perhubungan Darat dan Udara

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara;

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang rambu-rambu keselamatan dan marka jalan dan udara, penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah bidang

perhubungan darat dan udara pelaksanaan inventarisasi dan pendaftaran perbekalan umum serta pengulifikasian urusan jasa transportasi darat dan udara.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
- e. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara;

Kepala seksi lalu lintas angkutan darat dan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan udara lingkup lalu lintas angkutan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan darat dan udara lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan pemberian proses

izin trayek angkutan pedesaan, penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa angkutan darat dan udara dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan, dan pemberian dispensasi pengguna jalan angkutan darat dan udara.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara;
- c. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan Udara.

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan udara lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai kendaraan

angkutan penumpang dan angkutan barang serta penertiban dan penyelenggaraan penertiban terminal kota dan bandara.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna angkutan, penyelenggaraan koordinasi tentang penertiban kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta penertiban dan penyelenggaraan penertiban terminal dan bandara.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara;
- d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.4.5 Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi

kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi poin-poin berikut ini:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi Pos dan Telekomunikasi lingkup penyelenggaraan peraturan perundang-

undangan Pos dan Telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan system komunikasi dan pengembangan system informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard an prosedur pembangunan/pengembangan system informasi manajemen daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah;

- b. penyelenggaraan rogram dan kegiatan pada seksi pada pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan system komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard an prosedur pembangunan/pengembangan system informasi manajemen daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara;
- d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana komunikasi dan telekomunikasi lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, standard an prosedur pembangunan/pengembangan system informasi daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.
- d. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, pembangunan/pengembangan system informasi manajemen daerah.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.

- g. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

1. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
2. UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat;
4. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

